

STUDI KASUS LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL SUKU BADUY^{*)}

THE CASE STUDY OF NONFORMAL EDUCATION SERVICES FOR BADUY ETHNIC

Fransisca Nur'aini Krisna
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud
Gedung E lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta Pusat
email: run_taz@yahoo.com

Naskah diterima tanggal: 12/11/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 21/11/2013; Disetujui tanggal: 12/02/2014

Abstrak: *Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) bentuk layanan pendidikan masyarakat Baduy; 2) pihak yang berpartisipasi dalam pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat Baduy; dan 3) permasalahan yang ditemui serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Hasil studi menunjukkan bahwa: 1) pemberian layanan pendidikan masyarakat Baduy meliputi: (a) program keaksaraan fungsional; dan (c) program kesetaraan Paket A bagi masyarakat Baduy yang telah menyelesaikan program keaksaraan fungsional; 2) Pihak yang berkontribusi dalam pelayanan pendidikan, yaitu: (a) sekelompok orang secara personal dari penduduk setempat, (b) dinas pendidikan Kabupaten Lebak; (c) PKBM Dian Puspita dan WAMBY; serta Ditjen PAUDNI; 3) Masalah yang dihadapi, antara lain: (a) keterbatasan dana untuk penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan nonformal; (b) tingkat kehadiran warga belajar yang masih rendah; (c) penolakan kehadiran pendidikan nonformal oleh tetua adat; dan (d) pengaturan jadwal belajar sering tidak tepat, karena adanya waktu-waktu adat; 4) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah, antara lain: (a) melakukan subsidi silang, yakni dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang terdapat di SDN 2 Ciboleger dan SMPN 4 Bojong Menteng untuk kegiatan pembelajaran masyarakat Baduy; (b) mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik minat warga belajar dan berorientasi kecakapan hidup; (c) pendekatan kepada tetua adat dengan menjelaskan kebaikan dan manfaat dari pendidikan untuk masyarakat Baduy; dan (d) menyesuaikan jadwal pembelajaran dengan jadwal kegiatan adat.*

Kata kunci: *buta aksara, keaksaraan fungsional, paket A, masyarakat Baduy.*

Abstract: *This research tries to identify: 1) the type of education services received by the Baduy people, 2) all stakeholders who participate in providing education for Baduy people, 3) problems encountered by the stakeholders and efforts made to overcome these problems. Data was collected through observation and in-depth interview. This study shows that: 1) education services provided for Baduy people consist of: (a) functional literacy program and (b) Package A program for those who has accomplished functional literacy program; 2) Stakeholders who participate in providing education for Baduy people consist of a group of people from Baduy tribe itself, Dinas Pendidikan Lebak region, PKBM Dian Puspita, and WAMBY; 3) Problems encountered by the stakeholders comprise of (a) limited funding, (b) low attendance rates, (c) rejection by the elders, and (d) learning schedules sometimes clash with traditional activities; and 4) Efforts made to overcome these problems, include (a) cross-subsidy by utilizing facilities from SDN 2 Ciboleger (Public Elementary School) and SMPN 4 Bojong Menteng (Public Junior Secondary School), (b) set up the learning process become more interesting for Baduy people by including life-skills topics in the learning subject, (c) approached the elders and explained the benefits of education for Baduy people, and (d) adjusted the learning schedule with the traditional activities agenda.*

Keywords: *illiterate, functional literacy, Baduy people, Package A Program.*

^{*)} Studi ini merupakan bagian dari Studi Pengembangan Model Pendidikan Inklusif yang dilakukan Puslitjak Balitbang Kemdikbud.

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan lima misi pendidikan, yaitu: 1) Ketersediaan layanan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; 2) Keterjangkauan oleh seluruh lapisan masyarakat; 3) Kualitas/mutu dan 4) Kesetaraan bagi WNI dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan 5) Kepastian jaminan bagi WNI mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri (Kemdiknas, 2010)

Terkait dengan implementasi misi Kemdikbud tentang ketersediaan layanan pendidikan secara merata dan keterjangkauan layanan pendidikan, maka layanan pendidikan bagi masyarakat Baduy di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Banten. Dalam kaitannya dengan ketersediaan layanan pendidikan secara merata misalnya, pelayanan pendidikan secara merata bagi masyarakat Baduy di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak masih jauh dari yang diharapkan. Penyebab utama dan sebagai penyebab yang dominan, yaitu adanya penolakan dari tetua adat terkait dengan adanya penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal dalam bentuk apapun. Hal tersebut diyakini bahwa kehadiran penyelenggaraan pendidikan akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan pola hidup bagi masyarakat suku Baduy. Selanjutnya, berkaitan dengan keterjangkauan layanan pendidikan, hal ini dirasakan oleh para perintis penyelenggaraan pendidikan nonformal masih dianggap sebagai salah satu masalah karena tempat tinggal warga belajar masih terpencar-pencar dan secara geografis sulit terjangkau. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan nonformal diselenggarakan secara tersembunyi, sehingga lokasi pelayanan diupayakan ditempatkan di lokasi yang sulit terjangkau dan diketahui oleh masyarakat Baduy pada umumnya.

Pada tahun 2005, angka buta aksara nasional penduduk berusia 15 tahun mencapai 14,6 juta dan diperkirakan dari jumlah tersebut,

dua pertiganya kaum perempuan (Ditjen PNFI, 2007). Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara penyandang buta aksara terbesar dari 34 negara di dunia. Untuk memberantas buta aksara, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWBP-PPBA). Salah satu provinsi yang menjadi perhatian Pemerintah dalam pemberantasan buta aksara ini, adalah Provinsi Banten.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk buta aksara di Provinsi Banten pada tahun 2006 mencapai 21,52 % dengan rincian sebagai berikut: a) kelompok umur 7-15 tahun sebesar 4.99%; b) kelompok umur 15-44 tahun sebesar 1.74%; dan c) kelompok umur 45 tahun ke atas sebesar 14.99% (BPS, 2009). Selanjutnya, Harian Suara Karya menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk buta aksara ini berada di Kabupaten Lebak, di mana jumlah penduduk buta aksara di Kabupaten Lebak tersebut mencapai 22.000 orang (Suara Karya online, 2006). Hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa di Kabupaten Lebak hidup komunitas Suku Baduy yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersentuh pendidikan formal. Pendidikan formal tidak dapat menjangkau masyarakat Suku Baduy dikarenakan alasan adat yang masih sangat kuat. Untuk memberantas buta aksara di Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Lebak, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal PNFI (2006) mencanangkan program Keaksaraan Fungsional bagi masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat. Salah satu hal yang menyebabkan sebagian besar masyarakat ini masih buta aksara, yaitu kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan merupakan hal yang buruk bagi masyarakat. Pelaksanaan pendidikan bagi masyarakat Baduy ini menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Baduy yang melarang pendidikan bagi warganya (Mulyanto, dkk, 2008).

Permasalahan dalam studi kasus ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Apa bentuk layanan pendidikan yang

diberikan kepada masyarakat Baduy? 2) Siapa saja yang berperan dalam pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat Baduy? dan 3) Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat Baduy dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga masyarakat Baduy dapat memperoleh layanan pendidikan?

Berdasarkan rumusan permasalahan, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) bentuk pemberian layanan pendidikan masyarakat Baduy; 2) pihak yang berpartisipasi dalam pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat Baduy; dan 3) permasalahan yang ditemui dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga masyarakat Baduy dapat memperoleh layanan pendidikan.

Kajian Literatur

Pendidikan untuk semua

Konsep pendidikan untuk semua (*education for all*) menekankan bahwa semua anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan potensi dan karakteristik anak tersebut. Pengertian 'semua anak' dalam hal ini termasuk mereka yang selama ini terabaikan karena berbagai faktor, seperti penyandang kelainan, tinggal di daerah terpencil, berasal dari keluarga miskin, anak jalanan dan atau pekerja anak (Suwaryani, 2010).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Depdiknas, 2003).

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional dirancang untuk memberikan layanan pendidikan bagi semua anak bangsa di negeri ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 menyatakan

bahwa "Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak". Selanjutnya, Pasal 49 disebutkan bahwa "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan".

Masyarakat Baduy

Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang menempati wilayah Gunung Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Meskipun hanya berjarak sekitar 150 km dari Jakarta, namun Suku Baduy sangat berbeda dengan penduduk kota metropolitan. Masyarakat Suku Baduy masih memegang teguh adat-istiadat dan mereka hidup dengan sangat sederhana. Keyakinan masyarakat Baduy bersumber dari ajaran *Sunda Wiwitan* yang mempercayai *pikukuh* (keyakinan) sebagai titipan *karuhun* (leluhur). *Pikukuh* dalam sistem *religi Sunda Wiwitan* inilah yang menyebabkan masyarakat Baduy memproteksi diri dari pengaruh modernisasi sekaligus menjadi pedoman perilaku orang-orang Baduy (Mulyanto, dkk, 2008). Kepercayaan *Sunda Wiwitan* berorientasi pada bagaimana menjalani kehidupan yang mengandung ibadah dalam berperilaku, pola kehidupan sehari-hari, tindakan dan ucapan, dengan melalui hidup yang mengagungkan kesederhanaan (tidak bermewah-mewahan).

Prinsip yang dimiliki dan dijalani oleh masyarakat Baduy, antara lain: tidak membangun permukiman dari bebatuan, semen, genting, paku, atau produk industri modern lainnya. Selain itu, pantangan lain yang dilarang oleh adat, antara lain: larangan terhadap sekolah formal, larangan terhadap penggunaan alat transportasi, larangan menjual padi (padi dan huma yang berlebih akan disimpan untuk makan di hari tua), dan larangan memelihara binatang berkaki empat (Mulyanto, dkk, 2008).

Mata pencaharian pokok orang Baduy, yaitu berladang dengan sistem perladangan berpindah-pindah. Aktivitas berladang di masyarakat Baduy disebut *ngahuma*. Bagi warga Baduy yang sudah berkeluarga, wajib memiliki *huma* sendiri dan mematuhi tata aturan perladangannya. Berdasarkan tradisi, orang Baduy mengenal 5 macam

huma berdasarkan fungsinya, yakni: *huma serang*, *huma puun kokolot*, *huma tangtu*, *huma tuladan*, dan *huma panamping*. Orang Baduy menyelenggarakan kegiatan upacara terkait dengan kegiatan perladangan, yaitu upacara *Kawalu*. *Ngawalu*, merupakan upacara dalam rangka “kembalinya” padi dari ladang ke lumbung. Upacara ini dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing sekali dalam tiap-tiap bulan *kawalu* (Mulyanto, dkk, 2008). Pada bulan *Kawalu* masyarakat Baduy melaksanakan ibadah puasa selama tiga bulan, yaitu di bulan *Kasa*, *Karo*, dan *Katiga*.

Selain itu, terdapat juga upacara adat *ngalaksa* dan *seba*. Upacara *ngalaksa*, yaitu upacara membuat *laksa* (semacam mi yang terbuat dari tepung beras). Keterlibatan warga sangat dijunjung tinggi pada saat upacara *ngalaksa* karena upacara ini menjadi tempat perhitungan jumlah jiwa penduduk Baduy. Bahkan, bayi yang baru lahir maupun janin yang masih di dalam kandungan juga masuk dalam hitungan. Upacara *Seba*, berasal dari kata *nyaba*, artinya menyapa yang mengandung pengertian datang mempersembahkan *laksa* disertai hasil bumi lainnya kepada penguasa nasional. Substansi *seba*, yaitu silaturahmi pemerintahan adat kepada pemerintah nasional seperti camat, bupati, dan gubernur yang diadakan setahun sekali.

Program Keaksaraan Fungsional

Secara konseptual, keaksaraan dibedakan menjadi *basic literacy*, *functional literacy*, dan *advanced literacy*. *Basic literacy* adalah kemampuan keaksaraan yang paling dasar di mana penilaiannya didasarkan hanya sebatas kemampuan membaca, menulis dan berhitung. *Functional literacy* adalah pendidikan keaksaraan yang disertai dengan memberikan muatan kecakapan hidup/keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Keaksaraan fungsional mengintegrasikan materi “calistung” yang berkaitan langsung dengan perkembangan masyarakat dengan kecakapan hidup. *Advanced literacy* merupakan tingkat keaksaraan yang paling tinggi. Pada tingkatan ini, seseorang telah memiliki kapasitas untuk melakukan analisis, berpikir konseptual, dan kritis, serta mampu mengembangkan dan mengaktuali-

kasikan dirinya untuk memberikan kontribusi yang bernilai bagi kemajuan dan kesejahteraan dirinya dan orang lain (Summer Institute of Linguistics, 1999).

Program Keaksaraan Fungsional dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan NonFormal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. Program Keaksaraan Fungsional (KF). Program ini lebih berorientasi pada kelompok usia produktif, yaitu umur 10 - 44 tahun. Pendidikan Keaksaraan Fungsional tidak hanya mencakup pendekatan pembelajaran baca, tulis, dan hitung (calistung), akan tetapi juga terintegrasi dengan keterampilan usaha berdasarkan kebutuhan dan potensi warga belajar Masyarakat Baduy (Dirjen PNFI, 2007).

Kecakapan tersebut diarahkan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan potensi lingkungannya. Tujuan dari program ini yaitu untuk membelajarkan warga belajar agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai dasar untuk meningkatkan usaha dan taraf kehidupannya (Ditjen PNFI, 2006). Pendidikan keaksaraan fungsional juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas berpikir dan pengembangan potensi pribadi secara optimal. Pada akhirnya, seseorang mampu berperan dalam dinamika kehidupan serta memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial budaya.

Pendidikan Kesetaraan

Menurut Pasal 25, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C (Depdiknas, 2003). Pendidikan Kesetaraan dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya. Sasaran pendidikan kesetaraan yaitu warga masyarakat yang putus dalam jenjang atau antar jenjang yang karena berbagai alasan dan kondisi sehingga tidak dapat menempuh pendidikan pada jalur formal (Ditjen PAUDNI, 2007).

Dalam penyelenggaraannya, pendidikan Kesetaraan diatur melalui Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, sehingga penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat memenuhi Standar Proses, Standar Isi, dan Standar Penilaian Pendidikan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pencapaian standar tersebut didukung melalui berbagai kegiatan, antara lain: 1) Pengembangan dan penataan sistem pendataan; 2) Pengkajian dan pengembangan standar pendidikan kesetaraan; 3) Pengembangan rintisan penyelenggaraan dan pembelajaran; 4) Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran; 5) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C; 7) Sosialisasi, promosi, dan fasilitasi; dan 8) Pengendalian dan penjaminan mutu program (Depdiknas, 2006)

Hasil Penelitian sebelumnya

Program keaksaraan yang dilaksanakan di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada tanggal 29 Juni sampai dengan 20 Agustus 2009 dievaluasi dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa program keaksaraan fungsional di Desa Bades Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ini dapat dinyatakan berhasil ditinjau dari evaluasi kegiatan keterampilan dan tes signifikansi (menggunakan *t-test*) terhadap hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil *pre-test* dan *post test* warga belajar sebelum dan setelah program keaksaraan fungsional (KF). Strategi yang digunakan dalam program KF ini merupakan pendekatan persuasif dan pendekatan individu dan *self-determinism*. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, curah pengetahuan, dan pemberian tugas (Wahyuni, Sri Tutik, dkk, 2010).

Metode penelitian

Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2003), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang

bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya.

Populasi dan Sampling

Populasi studi ini mencakup seluruh masyarakat Suku Baduy di wilayah Gunung Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sampel studi ini terdiri atas beberapa warga/komunitas Baduy serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan pendidikan masyarakat Baduy. Narasumber yang diwawancarai terdiri atas: 1) H. Kasmin, selaku warga Baduy luar dan pendiri serta ketua WAMMBY (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy); 2) Rouf, selaku Sekretaris WAMMBY; 3) Sarpin, selaku warga Baduy luar sekaligus pencetus program keaksaraan; dan 4) Puspito, selaku penyelenggara PKBM Dian Puspita.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara secara mendalam kepada tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program keaksaraan dan program kesetaraan.

Waktu dan pelaksanaan studi

Studi dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2010 di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan, yaitu analisis deskriptif sehingga dari data yang diperoleh dari hasil studi dapat digambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dianalisis bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat Baduy (luar), siapa yang berpartisipasi dalam melaksanakan program layanan pendidikan nonformal, respon yang diberikan oleh Suku Baduy, dan bagaimana layanan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan, serta hambatan dan upaya menanggulangi masalah dimaksud.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pemberian Layanan Program Keaksaraan Masyarakat Baduy

Diawali oleh seorang warga Baduy luar yang memiliki kemampuan baca tulis sekedarnya mencoba untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya kepada warga sekitar pada tahun 1997. Pada waktu itu, ia hanya mengajarkan kedua putranya untuk mengenal huruf dan berhitung. Menurut Pak Sarpin, ia tidak bisa secara terang-terangan mengajarkan anak-anaknya membaca dan menulis, karena sekolah merupakan salah satu hal yang dilarang oleh adat.

Menurut *jaro* Cibeo, terdapat dua alasan mengapa sekolah formal dilarang adat. Alasan pertama, yaitu orang Baduy tugasnya mengurus *wiwitan*, sedangkan sekolah formal itu untuk mengurus negara, biarkan orang luar yang mengurus negara. Alasan kedua, yakni ada anggapan di kalangan masyarakat Baduy jika mereka sekolah, nanti pintar, dan jika sudah pintar nanti akan berbuat semaunya yang melanggar etis bagi kehidupan masyarakat Baduy.

Pada tahun 2007, Pemerintah mencanangkan Program Keaksaraan Fungsional (PKF) dan salah satu Kabupaten yang dipilih, yaitu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemilihan Kabupaten Lebak didasarkan pada jumlah penduduk buta huruf. Kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Lebak terdapat suku Baduy yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.000 jiwa dan sebagian besar dari mereka buta huruf. Program keaksaraan fungsional yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak ini merupakan bagian dari penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Program Keaksaraan Fungsional (PKF) dianggap sebagai alternatif yang paling tepat untuk menuntaskan buta Aksara di Kabupaten Lebak, khususnya di Desa Kanekes, tempat Masyarakat Baduy bermukim. Hal ini dikarenakan peraturan adat yang melarang pendirian sekolah formal di wilayah Baduy, sehingga bentuk program keaksaraan fungsional menjadi pilihan yang tepat. Meskipun demikian, program KF ini tidak serta merta berjalan dengan baik, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan tetua adat Baduy bahwa program ini tidak akan membawa

keburukan bagi masyarakat Baduy serta tidak merusak adat. Pihak WAMMBY juga memberikan pengertian kepada tetua adat agar mengizinkan pelaksanaan program KF tersebut. Pada awalnya, tidak banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti program KF ini meskipun telah ada sosialisasi dan persetujuan dari tetua adat.

Program Kesetaraan Masyarakat Baduy

Program Kesetaraan bagi masyarakat Baduy mulai dirintis sejak tahun 2008, akan tetapi mengingat banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pengaktaan, nomor pajak, dan lainnya, maka pada bulan Maret tahun 2010 pihak PKBM Dian Harapan selaku penyelenggara baru memperoleh izin resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Program kesetaraan ini diprakarsai oleh PKBM Dian Harapan dengan bantuan dari berbagai pihak. Sebenarnya, PKBM yang ada sebelumnya juga sudah menyediakan program Kesetaraan bagi masyarakat di Desa Ciboleger (desa yang berbatasan langsung dengan desa Kanekes), akan tetapi pada saat itu hanya Pak Sarpin dan Pak. H. Kasmin yang mengikuti program itu. Untuk program kesetaraan pada tahun 2010, pihak PKBM Dian Puspita merencanakan untuk membuka dua kelompok belajar khusus bagi masyarakat komunitas Baduy dari keseluruhan 5 kelompok belajar yang direncanakan. Akan tetapi, dari pihak Dinas Pendidikan hanya menyetujui 3 kelompok belajar untuk dapat diselenggarakan pada tahun ini. Rencana awal untuk program Kesetaraan Paket A akan membuka 3 kelompok, tetapi hanya disetujui satu kelompok, sedangkan untuk Paket B direncanakan untuk membuka 2 kelompok belajar dan disetujui oleh pihak Dinas. Namun demikian, dalam kenyataannya, pihak PKBM Dian Puspita tetap membuka 5 kelompok belajar, meskipun hanya 3 kelompok yang memperoleh bantuan dana dari pihak dinas pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian PKBM Dian Puspita terhadap pelaksanaan program kesetaraan dalam memberantas masyarakat Baduy yang buta aksara.

Perekrutan peserta belajar dari masyarakat Baduy dilakukan oleh Pak Sarpin, karena ia diminta oleh penyelenggara PKBM untuk menjadi salah satu pengurus PKBM dan membantu menangani pembelajaran bagi masyarakat Baduy.

Pada saat perekrutan peserta didik, dilakukan tes kemampuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calistung peserta dari Suku Baduy. Untuk Paket A bagi masyarakat Baduy dibedakan menjadi dua bagian, yakni kelas awal (untuk peserta yang memiliki kemampuan setara dengan siswa kelas 1-3 SD) dan kelas lanjutan (untuk peserta yang memiliki kemampuan setara dengan siswa kelas 4-6 SD). Meskipun seluruh peserta didik dari Baduy ini telah memiliki ijazah kelulusan dari program keaksaraan, namun kemampuan mereka berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan tes kemampuan agar dapat dikelompokkan sesuai dengan kemampuan mereka.

Tenaga pengajar yang mengajar pada program kesetaraan ini berkualifikasi pendidikan D2 pendidikan guru yang belum memperoleh pekerjaan. Mereka berasal dari desa Ciboleger maupun desa-desa sekitarnya. Pada mulanya mereka diajak berdiskusi mengenai pendidikan bagi masyarakat Baduy dan Pak Sarpin menjelaskan bagaimana cara menjadi tutor bagi masyarakat Baduy. Meskipun honor yang diperoleh oleh tenaga pengajar ini cukup rendah, akan tetapi mereka tetap bersemangat untuk mengajar. Jumlah tutor seluruhnya sebanyak 9 orang, di mana dua di antaranya mengajarkan Paket A dan 7 orang tutor lainnya mengajarkan Paket B.

Kegiatan pembelajaran untuk program kesetaraan ini dilakukan setiap hari Jum'at dan hari Minggu. Setiap hari diberikan dua materi dengan lama pembelajaran selama 3 jam (masing-masing materi 90 menit). Menurut Pak Sarpin, khusus bagi kelompok masyarakat Baduy untuk mata pelajaran Agama ditiadakan. Hal ini dikarenakan masyarakat suku Baduy masih memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan, sehingga untuk tidak menyinggung perasaan mereka serta untuk menghindari konflik, maka mata pelajaran Agama tidak diberikan. PKBM menetapkan target tiga tahun untuk kelulusan peserta program paket B, sedangkan untuk warga komunitas Baduy yang mengikuti program paket A, kelulusannya tergantung pada kemampuan mereka, apakah mereka ditempatkan di kelas awal atau kelas lanjutan. Untuk peserta yang belajar di kelas awal, maka ditargetkan dalam 6 tahun akan lulus dari program ini, sedangkan

untuk peserta di kelas lanjutan diharapkan paling lama 3 tahun sudah dapat lulus.

Peserta program kesetaraan dari komunitas Baduy terdiri atas 20 orang dan seluruhnya mengikuti program Paket A, termasuk anak Pak Sarpin. Pak Sarpin sendiri telah lulus program Paket B dan berencana akan melanjutkan ke program Paket C. PKBM Dian Puspita ini meminjam ruang kelas dari SDN 2 Ciboleger dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi para peserta program. Namun, khusus untuk pembelajaran bagi masyarakat Baduy tidak diselenggarakan di SDN 2 Ciboleger, melainkan di SMPN 4 Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar. Menurut penyelenggara PKBM dan Pak Sarpin, pembelajaran untuk masyarakat komunitas Baduy tidak dilakukan di SDN 2 Ciboleger dikarenakan lokasinya sangat dekat dengan Desa Kanekes, tempat bermukimnya masyarakat Baduy. Menurut Pak Sarpin, jika lokasinya terlalu dekat, maka akan terlihat oleh para tetua adat, sedangkan hingga saat ini tetua adat masih belum mengetahui mengenai program kesetaraan ini. Hal ini dikarenakan, tetua adat masih belum mengizinkan bentuk pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok seperti di kelas-kelas. Oleh karena itu, untuk menghindari sanksi dari tetua adat karena penyelenggaraan program kesetaraan ini, pihak PKBM memindahkan lokasi pembelajaran khusus bagi masyarakat Baduy.

Dukungan yang diperoleh dalam penyelenggaraan program kesetaraan ini berupa monitoring dan kunjungan dari pihak Dinas Pendidikan setempat terhadap pelaksanaan program. Selain itu, dukungan dari masyarakat yang menjadi tenaga pengajar di PKBM ini juga menjadi salah satu aspek yang memungkinkan terwujudnya program kesetaraan bagi masyarakat Baduy.

Pelaksanaan Program Keaksaraan

Masyarakat Baduy yang masih memegang teguh adat tidak memperkenankan orang luar selain warga Baduy sendiri untuk menjadi tenaga pengajar pada program Keaksaraan Fungsional (KF) ini. Oleh karena itu, untuk menyiasati agar program KF ini dapat berjalan baik, maka hal pertama yang dilakukan, yaitu mengajarkan warga Baduy yang bisa membaca dan menulis seperti Pak Sarpin, Pak Rouf dan lainnya untuk

menjadi tutor bagi warga Baduy. Dengan memanfaatkan tutor dari komunitas Baduy sendiri, program ini akhirnya dapat berjalan. Jumlah peserta program sebanyak 250 orang dibagi dalam 25 kelompok, sehingga setiap tutor memegang sepuluh peserta didik. Target peserta program kesetaraan ini, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan belum bisa membaca dan menulis. Menurut Pak Sarpin, beliau juga menyertakan anak-anak di bawah usia 15 tahun yang memang ingin belajar membaca dan menulis. Selain itu, beliau mengajarkan komunitas membaca, menulis dan berhitung melalui pendekatan personal dengan cara mendatangi rumah-rumah warga yang ingin belajar. Beliau sendiri memegang dua kelompok belajar dengan rentang usia antara 10 tahun hingga 40 tahun. Menurutnya, pendekatan kepada anak-anak dibantu juga oleh anak Pak Sarpin. Seperti halnya yang dilakukan Pak Sarpin, tutor yang mengajar di program KF ini mendatangi rumah-rumah warga karena tidak memungkinkan untuk mengumpulkan mereka menjadi satu.

Program KF ini tidak hanya mengajarkan komunitas untuk mengenal keaksaraan dasar (calistung), tetapi juga mengajarkan kemampuan kecakapan hidup (*life skill*). Kecakapan hidup yang diajarkan, yaitu keterampilan yang menunjang kehidupan warga Baduy seperti menenun (warga diajarkan macam-macam motif tenun yang bervariasi), membuat gula aren, pengairan yang baik dan lainnya. Pendidikan kecakapan hidup ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat Baduy dan menjadi salah satu alasan mengapa program ini diizinkan oleh tetua adat.

Setelah 6 bulan berlangsung, seluruh peserta program keaksaraan mengikuti ujian calistung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus WAMMBY, dari 250 peserta keaksaraan, hanya 10 peserta yang tidak lulus ujian. Sepuluh orang yang tidak lulus ujian dikarenakan pada saat itu mereka harus memanen hasil pertanian mereka. Pihak WAMMBY melakukan ujian ulang bagi mereka yang tidak lulus dan mereka pada akhirnya dinyatakan lulus.

Pada saat studi ini dilakukan, banyak warga Suku Baduy yang sudah melek huruf, dengan program keaksaraan fungsional ini mereka tidak lagi mudah tertipu pada saat menjual hasil bumi

ke kota. Menurut pengakuan salah seorang warga yang saat ini bisa membaca dan menulis, dia bahkan menggunakan teknologi telepon seluler untuk melakukan transaksi penjualan hasil kerajinan produksinya (Kompas, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa program keaksaraan fungsional mampu mengubah perilaku dan kehidupan warga Baduy.

Pihak yang berperan dalam pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat Baduy Sekelompok Warga Baduy

Beberapa orang penduduk setempat telah merintis pemberian layanan pendidikan nonformal melalui program a) program membaca, menulis, dan berhitung; b) program kesetaraan keaksaraan fungsional; dan c) program paket A bagi masyarakat yang telah menyelesaikan program keaksaraan fungsional. Pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, yaitu 1) Bapak H. Kasmin, selaku warga Baduy luar dan pendiri serta ketua WAMMBY (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy), selain itu, Aja, H.Cicin, dan Jali; 2) Rouf, selaku Sekretaris WAMMBY; 3) Sarpin, selaku warga Baduy luar sekaligus pencetus program keaksaraan; dan 4) Puspito, selaku penyelenggara PKBM Dian Puspita.

Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (WAMMBY)

WAMMBY didirikan oleh empat warga Baduy luar yang merupakan empat orang pertama di Baduy luar yang bisa menulis, membaca, dan berhitung, yaitu H. Kasmin, Aja, H.Cicin, dan Jali. Tujuan pembentukan WAMMBY, yaitu untuk menjembatani hubungan antara Suku Baduy dengan masyarakat di sekitar pemukiman Suku Baduy. Suku Baduy yang mendiami pegunungan Kendeng (Desa Kanekes), secara langsung berbatasan dengan penduduk Desa Ciboleger, Kabupaten Lebak. Untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat Desa Ciboleger, WAMMBY berperan sebagai fasilitator. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat Desa Ciboleger, tetapi juga untuk menjaga agar lingkungan adat Suku Baduy tidak diusik oleh orang luar.

Keberadaan WAMMBY juga memperjuangkan masalah keadatan Suku Baduy di DPR, agar suara Masyarakat Baduy dapat didengar oleh para wakil

rakyat tersebut. Berkat perjuangan WAMMBY, Pemda Kabupaten Lebak mengeluarkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 32/2001 tentang Perlindungan atas Hak *Ulayat* Masyarakat Baduy. Terbitnya Perda yang melindungi hak-hak Masyarakat Baduy terbukti berdampak positif terhadap kondisi kawasan hutan yang merupakan ruang hidup Masyarakat Baduy. Tekanan dan ancaman yang datang dari luar dapat diatasi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya Perda tersebut. Perda yang merupakan kekuatan hukum formal tersebut mampu menambah kekuatan untuk mempertahankan dan melestarikan hutan di wilayah Masyarakat Baduy. Dengan adanya Perda tersebut, dilakukan pemagaran agar kawasan hutan tidak diserobot oleh pihak industri maupun oleh masyarakat daerah sekitarnya.

Kendala-kendala dalam memberikan layanan pendidikan dan upaya mengatasi kendala

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program kesetaraan ini, antara lain: keterbatasan dana, karena PKBM harus mengupayakan sendiri dana penyelenggaraan program kesetaraan untuk kedua kelompok belajar yang tidak disetujui oleh dinas pendidikan. Salah satu upaya untuk memecahkan kendala tersebut dengan cara pihak PKBM melakukan subsidi silang, yaitu menggunakan fasilitas yang terdapat pada SDN 2 Ciboleger dan SMPN 4 Bojong Menteng untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, seperti ruangan kelas, kapur, dan buku paket. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan *sharing* sarana dan prasarana (Depdiknas, 2011).

Hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan ini, yaitu tingkat kehadiran Masyarakat Baduy yang belum mencapai seratus persen. Hal ini dikarenakan sebagian warga Baduy terkadang harus berladang, sehingga mereka terpaksa meninggalkan pembelajaran di PKBM. Meskipun demikian, pihak penyelenggara PKBM tetap optimis bahwa program kesetaraan ini dapat tetap berjalan baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik dan berorientasi pada kecakapan hidup, seperti menge-

mas pembelajaran calistung dengan cara membuat kue (membaca resep, menakar bahan sesuai resep, dan lain-lain) sehingga warga tetap mau datang dan memanfaatkan hasil pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, masalah yang paling besar dirasakan yaitu adanya penolakan keras dari tetua adat, medan tempuh yang sulit dijangkau, pengaturan jadwal belajar yang sering terbentur dengan waktu-waktu adat dan keterbatasan dana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain melakukan pendekatan kepada tetua adat dengan memberikan pengertian tentang pentingnya pendidikan dan bahwa pendidikan yang diberikan tidak akan merusak adat istiadat, menyesuaikan jadwal belajar dengan kegiatan adat.

Harapan Masyarakat Baduy

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pihak yang pernah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bagi masyarakat Baduy, diketahui bahwa mereka menyimpan harapan yang besar terhadap pendidikan bagi masyarakat Baduy di masa yang akan datang. Pihak penyelenggara PKBM berharap agar program keaksaraan dapat diselenggarakan kembali, karena masih banyak masyarakat Baduy yang buta huruf. Selain itu, PKBM juga berharap jika di masa datang program kesetaraan tersebut diselenggarakan kembali, maka penyelenggaraannya tidak hanya enam bulan, tetapi dapat berkelanjutan hingga seluruh komunitas mampu membaca, menulis, dan berhitung. PKBM juga berharap agar pihak Dinas Pendidikan lebih peduli terhadap program kesetaraan yang mereka selenggarakan saat ini, karena dari dua kelompok belajar yang direncanakan untuk masyarakat Baduy, hanya satu yang disetujui oleh pihak Dinas.

Harapan lainnya, yaitu komunitas dan tetua adat Baduy mau menerima pendidikan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Sarpin selaku warga Baduy yang selama ini bergerilya dalam membelajarkan masyarakatnya. Meskipun demikian, Pak Sarpin mengatakan bahwa dibutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya pendidikan dapat memasuki wilayah Baduy. Oleh karena itu, beliau berharap bahwa di masa yang akan datang instansi seperti dinas pendidikan setempat

maupun lembaga peduli pendidikan lainnya berkenan untuk bekerja sama.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat Baduy, yaitu meliputi pendidikan keaksaraan fungsional dan pendidikan kesetaraan. Pendidikan keaksaraan fungsional yang diselenggarakan bagi Masyarakat Baduy dimulai pada tahun 2007 dan terbukti membuahkan hasil dengan banyaknya warga Baduy yang saat ini telah dapat membaca, menulis, dan berhitung. Tidak hanya itu, pendidikan keaksaraan fungsional ini juga meningkatkan kemampuan masyarakat Baduy dalam berladang, berdagang, dan bertenun. Larangan adat terhadap sekolah formal tidak menyurutkan langkah sekelompok orang yang memprakarsai program ini untuk tetap melaksanakan program keaksaraan fungsional. Berbekal pengetahuan ala kadarnya, disertai negosiasi yang baik dengan tetua adat, pada akhirnya program ini dapat terlaksana di Baduy. Namun demikian, amat disayangkan karena program ini hanya berlangsung selama 6 bulan dan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Pendidikan kesetaraan fungsional bagi masyarakat Baduy yang dirintis sejak tahun 2008 akhirnya dapat direalisasikan kembali pada tahun 2010 oleh PKBM Dian Puspita dengan bantuan dari berbagai pihak. Meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, program kesetaraan fungsional ini dapat berjalan dengan baik, setidaknya ada 20 orang warga Baduy yang mengikuti program kesetaraan Paket A. Bantuan dan dukungan baik dari WAMMBY maupun dari Pak Sarpin selaku warga Baduy, mampu mengakomodasi kebutuhan pembelajaran kesetaraan ini. Akan tetapi, dikarenakan keterbatasan dana dari pihak PKBM, maka belum semua warga Baduy yang telah lulus program keaksaraan fungsional bisa mengikuti program kesetaraan Paket A.

Banyak pihak yang berperan di dalam upaya memberikan layanan pendidikan bagi Masyarakat Baduy, seperti Direktorat PNFI Kemdikbud, Pak Sarpin selaku pemrakarsa pendidikan keaksaraan, H. Kasmin selaku anggota DPRD Kabupaten Lebak, WAMMBY, PKBM Dian Puspita, Dinas

Pendidikan Kabupaten Lebak, dan warga desa Ciboleger yang menjadi tutor.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan pendidikan, terutama terkait dengan penolakan keras dari tetua adat, medan tempuh yang sulit dijangkau, pengaturan jadwal belajar yang sering terbentur dengan waktu-waktu adat dan keterbatasan dana.

Salah satu upaya untuk memecahkan kendala tersebut dengan cara pihak PKBM melakukan subsidi silang, yaitu menggunakan fasilitas yang terdapat pada SDN 2 Ciboleger dan SMPN 4 Bojong Menteng untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, seperti ruangan kelas, kapur, dan buku

Besar harapan masyarakat Baduy untuk bisa mengenyam pendidikan karena mereka telah merasakan manfaat dari pendidikan, meskipun hanya berupa pendidikan keaksaraan dan bersifat sementara. WAMMBY sebagai wadah bagi masyarakat Baduy juga mengharapkan agar Pemerintah menyelenggarakan kembali program keaksaraan karena program tersebut baru menjangkau sebagian kecil dari masyarakat Baduy.

Saran

Program keaksaraan yang dilaksanakan pada tahun 2007 hanya menjangkau sekitar 250 orang warga Baduy, padahal jumlah populasi masyarakat Baduy mencapai 9.000 jiwa lebih. Oleh karena itu, Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak perlu menyelenggarakan kembali program keaksaraan bagi masyarakat Baduy. Dinas pendidikan dapat kembali bergandengan tangan dengan WAMMBY agar program keaksaraan ini mendapat dukungan lagi dari pihak tetua adat. Selain itu, Dinas pendidikan juga dapat bekerjasama dengan PKBM Dian Puspita untuk memudahkan dalam penyelenggaraan program tersebut, karena PKBM ini telah berinteraksi dengan masyarakat Baduy untuk program kesetaraan.

Program keaksaraan ini diharapkan jangan hanya sesaat atau berupa *on-off program*. Pemerintah harus mengupayakan memberdayakan PKBM yang terdapat di Kabupaten Lebak untuk dapat membantu pelaksanaan dan keberlanjutan program keaksaraan ini. Di-

harapkan agar target dari program keaksaraan juga mencakup anak-anak usia sekolah yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan. Mengingat bahwa pada tahun 2007 program ini lebih banyak menyentuh masyarakat dewasa, maka perlu kiranya perhatian Pemerintah untuk mengupayakan agar anak-anak usia sekolah juga ikut serta dalam program keaksaraan ini.

Penyelenggaraan kembali program keaksaraan dimaksudkan agar seluruh warga Baduy setidaknya dapat membaca dan menulis, sehingga memudahkan mereka pada saat melakukan perniagaan dengan warga di luar Baduy. Diharapkan agar program keaksaraan juga berupa keaksaraan fungsional yang tidak hanya mengajarkan calistung, tetapi juga mengajarkan kecakapan hidup. Hal ini dikarenakan program keaksaraan fungsional yang dilaksanakan pada tahun 2007 diketahui telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Baduy.

Penyelenggara program keaksaraan maupun program kesetaraan bagi masyarakat Baduy, seperti PKBM Dian Puspita, membuat strategi pembelajaran dengan mengemas pembelajaran calistung dalam bentuk pembelajaran kecakapan hidup. Selain itu, penyelenggara juga diharapkan bisa fleksibel di dalam menyusun jadwal pembelajaran agar dapat mengakomodasi hari-hari adat warga Baduy, sehingga tidak berbenturan dengan jadwal pembelajaran.

Pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak diharapkan dapat memperluas program kesetaraan yang saat ini telah dirintis oleh PKBM Dian Puspita. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yaitu dengan memberikan ijin kepada PKBM Dian Puspita untuk membuka beberapa kelas lagi bagi masyarakat Baduy. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Baduy yang

telah dinyatakan lulus dalam program keaksaraan fungsional pada tahun 2007 dapat melanjutkan ke program kesetaraan. Tidak hanya itu, Dinas pendidikan juga diharapkan dapat membantu dalam hal penyediaan tenaga pengajar untuk membantu penyelenggaraan program kesetaraan ini.

Selain perluasan program, Dinas pendidikan bersama-sama dengan PKBM penyelenggara harus berupaya untuk meningkatkan kualitas program kesetaraan yang diberikan. Diperlukan kerjasama yang sinergis antara pihak-pihak yang terkait. Peningkatan mutu tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, serta pengembangan metode belajar merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas program kesetaraan bagi warga Baduy.

Disadari bahwa perlu waktu cukup lama untuk mengubah pola pikir serta budaya adat masyarakat Baduy yang melarang sekolah. Perlu dilakukan kampanye secara persuasif terhadap masyarakat Baduy, terutama para tetua adat mengenai pentingnya pendidikan bagi warga mereka. Kampanye/sosialisasi ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, seperti WAMBY, anggota masyarakat Baduy sendiri, dan pihak dinas pendidikan. Pola pikir yang memandang negatif pendidikan harus diluruskan dan sebaiknya dilakukan pendekatan secara personal kepada para tetua adat untuk lebih meyakinkan bahwa pendidikan tidak akan mengakibatkan kerusakan alam di bumi Baduy. Tidak hanya itu, kampanye juga dapat melibatkan tokoh-tokoh yang telah merasakan manfaat pendidikan seperti H.Kasmin yang kini menjadi anggota DPRD. Kepedulian Pemerintah terhadap Masyarakat Baduy menjadi sangat penting demi tercapainya pendidikan untuk semua.

Acknowledgment

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Subijanto atas bimbingan dan arahan Karya Tulis Ilmiah berjudul **STUDI KASUS LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL SUKU BADUY**, sehingga layak diterbitkan pada Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud, Vol. 20, No.1, Edisi Maret 2014, ISSN 0215-2673, Terakreditasi LIPI Nomor: 438/AU2/P2MI-LIPI/08/2012.

Pustaka Acuan

- Ardan, Rachman. 2004. *The Profile of Upper Integument Lip of Baduy Tribe, and The Nearby Living Sundanese From South Banten, West Java, Indonesia*, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/the_profile_of_uil.pdf (diakses tanggal 16 September 2010)
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003-2009*, diperoleh dari situs http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=37 (diakses tanggal 29 September 2010).
- Creswell, W. John. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006. *Acuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan, Panduan Umum Pelatihan Program Pendidikan Keaksaraan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011, *Rembug Nasional Kementerian Pendidikan Nasional*, Pusdiklat, Depok Bogor, Jawa Barat.
- Direktorat Jenderal Pendidikan NonFormal dan Informal. 2007. *Siapkan Strategi Kementerian Pendidikan Nasional*, <http://pnfi.kemdiknas.go.id/publikasi/read/20090113095749/PNF-Siapkan-Strategi.html> (diakses 10 Februari 2010).
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWBP- PPBA).
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014*, Jakarta.
- Kompas. 07 Desember 2009. *Meski Tak Sekolah Warga Baduy Bisa SMS-an dan Pakai Ponsel*. <http://www.kompas.com/read/xml/2009/12/06/17202511/Meski.Tak.Sekolah.Warga.Baduy.Bisa.SMS-an.dan.Pakai.Ponsel> (diakses tanggal 24 September 2010).
- Mulyanto, Prihartanti, Nanik, Moordiningsih, 2008. *Perilaku Konformitas Masyarakat Baduy*. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/650/1/1PERILAKU_KONFORMITAS-Baduy.doc (diakses tanggal 5 Oktober 2010).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32/2001 tentang Perlindungan atas Hak *Ulayat* Masyarakat Baduy.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
- Rasyid, S. Ahmad, dkk. "Reinterpretasi Konsep Pembinaan Masyarakat Terasing Menuju Konsep Pemberdayaan Berorientasi Kearifan Lokal", *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2002: 93-106. http://eprints.ums.ac.id/106/1/1_ahmad_sinala.pdf (diakses tanggal 15 September 2010).
- Suwaryani, Nanik. 2010. *"Pengembangan Konsep Model Pendidikan Inklusif"*. Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Suara Karya Online, 4 Mei 2006. "Wapres Jusuf Kalla Hari Ini Canangkan Wajar Diknas di Banten" <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=142849> (diakses tanggal 25 September 2010).

Wahyuni, Sri Tutik, Rusdianto, Syofia Cholidawati, Septi Nur Cahyaningrum. 2010. *Analisis Program Keaksaraan Fungsional terhadap Peningkatan Angka Melek Aksara (Literacy Rate) di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*, Universitas Negeri Malang, 2010.

Summer Institute of Linguistics, Inc, 1999. *What is Functional Literacy?* <http://www.sil.org/lingualinks/literacy/referencematerials/glossaryofliteracyterms/WhatIsFunctionalLiteracy.htm> (diakses tanggal 16 September 2010).